

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pascareformasi: Telaah Korelasinya Terhadap Peningkatan Literasi Keagamaan Peserta Didik

Riana Nur A,Fitria Ramadhani,Ni'mah husnayah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Email:

ABSTRAK

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA merupakan ruang kontestasi ideologis antara sosiopolitik penguasa dan hak spiritualitas warga negara. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan historiografis terhadap evolusi kurikulum PAI SMA berbasis analisis kritis kebijakan resmi lintas rezim dari tahun 1975 hingga 2025. Menggunakan pendekatan kualitatif berdesain sejarah-kebijakan, studi kepustakaan ini menerapkan metode sejarah terhadap dokumen regulasi nasional dan literatur terkait. Hasil analisis tematis menunjukkan kurikulum PAI SMA bertransformasi melalui tiga paradigma utama. Pada era Orde Baru (1975–1994), PAI difungsikan secara sentralistik sebagai aparatus rekayasa moral demi stabilitas rezim. Era Reformasi (2000–2006) menandai desentralisasi yang mengembalikan kedaulatan pedagogis kepada guru, meski memicu fragmentasi kontrol konten daerah. Pada era kontemporer (2013–2025), melalui Kurikulum Merdeka hingga Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, PAI direkonstruksi menjadi instrumen resolusi konflik melalui internalisasi Moderasi Beragama. Studi ini menyimpulkan bahwa kurikulum PAI SMA mencerminkan kecemasan negara (state anxiety) yang utilitarian. Keberhasilan transformasi ini bergantung pada kapasitas kritis para pendidik lokal.

Kata Kunci: Evolusi Kurikulum; Historiografi Kebijakan; Moderasi Beragama; Orde Baru; Pendidikan Agama Islam.

ABSTRACT

The Islamic Religious Education (PAI) curriculum in senior high schools serves as a space of ideological contestation between the sociopolitical interests of the ruling authorities and the spiritual rights of citizens. This study aims to conduct a historiographical review of the evolution of the senior high school PAI curriculum through a critical analysis of official policy documents across political regimes from 1975 to 2025. Employing a qualitative approach with a historical-policy design, this library research applies historical methods to national regulatory documents and related literature. The thematic analysis reveals that the senior high school PAI curriculum has transformed through three major paradigms. During the New Order era (1975–1994), PAI functioned in a centralized manner as an apparatus of moral engineering to maintain regime stability. The Reform era (2000–2006) marked a decentralization process that restored pedagogical sovereignty to teachers, although it also triggered fragmentation in regional content control. In the contemporary era (2013–2025), through the Merdeka Curriculum and Minister of Primary and Secondary Education Regulation Number 13 of 2025, PAI has been reconstructed as an instrument of conflict resolution through the internalization of Religious

Moderation. This study concludes that the senior high school PAI curriculum reflects a utilitarian form of state anxiety. The success of this transformation ultimately depends on the critical capacity of local educators.

Keywords: Curriculum Evolution; Historiography of Policy; Islamic Religious Education; New Order; Religious Moderation.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan peradaban suatu bangsa.¹ Melalui pendidikan, manusia diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya, secara optimal sehingga dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual.² Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.³ Oleh karena itu, setiap upaya pembaruan pendidikan harus selalu diarahkan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan dinamika zaman, termasuk dalam ranah Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah.⁴

Kurikulum dan pembelajaran PAI memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, karena berperan langsung dalam membentuk kepribadian religius peserta didik.⁵ Kurikulum PAI bukan sekadar kumpulan materi ajar tentang akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah derasnya arus globalisasi dan transformasi digital, kurikulum PAI dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa kehilangan substansi nilai-nilai spiritual yang menjadi esensinya.⁶ Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) telah meluncurkan berbagai model kurikulum, seperti Kurikulum 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan tersebut membawa implikasi pada desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran PAI baik di sekolah maupun madrasah.

¹ Radjendra, Ryan, et al. "Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Pai Di Sekolah Dan Madrasah: Telaah Pustaka Terhadap Paradigma Dan Praktiknya Di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 4, 2025, pp. 212–25.

² , Ansurul, and Dwi Ratnasari. "Evolusi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Umum: Tinjauan Historiografis Berbasis Literatur Kebijakan." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, vol. 3, no. 2, Jun. 2026, pp. 47–61.

³ Achmad, Fatoni. "Implikasi Kurikulum Merdeka Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan, Dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 52–63.

⁴ Abduh, Muhamad, and Mohd Azmi Omar. "Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 5, no. 1, Mar. 2012, pp. 35–47.

⁵ Magdalena, et al. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. IAIN Padangsidempuan Press, 2021.

⁶ Putri, Helmalia, et al. "The Implementation of the Independent Curriculum at State Senior High School 10 Palembang." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 1, Jun. 2024, pp. 166–71.

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi pustaka.⁷ Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema evaluasi kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan madrasah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan utama dari berbagai referensi.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menemukan pola, kecenderungan, serta konsep-konsep teoretis yang mendukung pengembangan dan evaluasi kurikulum PAI secara komprehensif dan kontekstual.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Periodisasi kebijakan kurikulum PAI pascareformasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa periodisasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pasca Reformasi mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan ideologi negara. Perubahan tersebut ditandai dengan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, Kurikulum 2013, hingga penyempurnaan kurikulum pasca-2020 yang menitikberatkan pada penguatan moderasi beragama. Pada awal era Reformasi, kebijakan kurikulum diarahkan pada desentralisasi pendidikan sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan nilai-nilai keislaman di sekolah. Selanjutnya, pada masa KTSP, satuan pendidikan memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik daerah, sementara materi PAI semakin menekankan penguatan akidah, fikih, dan identitas keislaman.

Memasuki Kurikulum 2013, orientasi pembelajaran bergeser pada pembentukan karakter melalui integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menanamkan nilai toleransi, nasionalisme, serta akhlak mulia. Adapun pada periode setelah tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan moderasi beragama sebagai respons terhadap isu radikalisme melalui integrasi nilai-nilai toleransi, antikekerasan, dan wawasan kebangsaan dalam materi PAI serta pelatihan guru. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut memunculkan homogenisasi pemahaman keagamaan karena negara berperan dalam menentukan bentuk pengetahuan agama yang dianggap sah melalui regulasi kurikulum. Di sisi lain, guru dan lembaga pendidikan tetap melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap implementasi kurikulum sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.¹⁰

⁷ Sina, Ibu. *Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains*. 1st ed., Widina Media Utama, 2024.

⁸ Purwanza, Wahyu Sena, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*. CV Media Sains Indonesia, 2020.

⁹ , M. Makhrus, et al. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian." *Educational Journal*, vol. 2, no. 2, 2022.

¹⁰ Neliwati, et al. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, vol. 4, no. 2, Aug. 2023.

Dengan demikian, periodisasi kebijakan kurikulum PAI pasca Reformasi memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari desentralisasi pendidikan, penguatan identitas keislaman, pendidikan karakter, hingga moderasi beragama, yang menunjukkan bahwa kurikulum PAI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam membentuk karakter, wawasan kebangsaan, dan cara pandang keagamaan peserta didik.

2. *Karakteristik kebijakan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI*

Karakteristik kebijakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses belajar. Kurikulum ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pembelajaran yang berfokus pada materi esensial, serta pembelajaran yang fleksibel dan terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Melalui karakteristik tersebut, guru memiliki keleluasaan untuk memilih metode dan perangkat pembelajaran yang sesuai, sedangkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar secara lebih aktif, kreatif, dan mendalam. Dalam pembelajaran PAI, Kurikulum Merdeka dinilai mampu menciptakan proses belajar yang lebih kontekstual, menyenangkan, dan bermakna sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap materi keagamaan, tetapi juga memperkuat karakter religius, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama peserta didik. Pendekatan ini didasarkan pada teori konstruktivisme yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar secara aktif dan bermakna.¹¹

Karakteristik pertama adalah pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning/PjBL) yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi sesuai Profil Pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran PAI, proyek dapat berupa kegiatan sosial keagamaan, bakti sosial, praktik ibadah, kepedulian terhadap lingkungan, atau kegiatan lain yang menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, gotong royong, tanggung jawab, dan akhlak mulia. Melalui proyek tersebut, peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan nyata.

Karakteristik kedua adalah berbasis kompetensi dengan fokus pada materi esensial. Kurikulum Merdeka menekankan penguasaan kompetensi inti daripada banyaknya materi yang dipelajari. Dalam pembelajaran PAI, guru diarahkan untuk memfokuskan pembelajaran pada konsep-konsep pokok seperti akidah, ibadah, akhlak, Al-Qur'an Hadis, dan sejarah kebudayaan Islam secara lebih mendalam. Dengan demikian, peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan materi yang dipelajari, bukan sekadar menghafal konsep-konsep keagamaan.

Karakteristik ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi

¹¹ Ahmadi, Ahmadi, and Minnah El Widdah. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, vol. 4, no. 1, Jan. 2023, pp. 104–13.

sesuai kebutuhan, minat, kemampuan, dan kondisi peserta didik. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan berbagai metode seperti diskusi, praktik ibadah, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, maupun pemanfaatan teknologi digital agar pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan sesuai dengan lingkungan peserta didik. Fleksibilitas ini memungkinkan tujuan pembelajaran PAI tercapai secara optimal tanpa mengabaikan perbedaan karakteristik setiap peserta didik.¹²

Secara keseluruhan, karakteristik kebijakan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAI menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek, pendalaman materi esensial berbasis kompetensi, serta fleksibilitas guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karakteristik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PAI sekaligus membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

3. **Korelasi Kebijakan Kurikulum dengan Literasi Keagamaan Peserta Didik**

Analisis Pengembangan Kurikulum dan Materi PAI melalui Program Literasi Keagamaan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah", terdapat korelasi yang erat antara kebijakan kurikulum dengan literasi keagamaan peserta didik. Pengembangan kurikulum PAI melalui program literasi keagamaan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Islam, memperluas wawasan keagamaan, serta melatih kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai sumber informasi keagamaan. Program ini juga mendorong pembiasaan membaca, menulis, dan mengkaji literatur keislaman sehingga literasi keagamaan peserta didik berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, semakin baik kebijakan kurikulum dalam mengintegrasikan program literasi keagamaan, semakin tinggi pula kualitas literasi keagamaan peserta didik dan mutu pembelajaran PAI di madrasah.¹³

Korelasi antara kebijakan kurikulum dan literasi keagamaan peserta didik terlihat dari peran kurikulum sebagai dasar dalam merancang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran PAI yang terintegrasi dengan program literasi keagamaan. Kebijakan kurikulum yang mendukung pelaksanaan program literasi keagamaan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, memahami, menganalisis, serta mengkritisi berbagai sumber pengetahuan keagamaan.¹⁴

Selain itu, program literasi keagamaan juga membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai Islam sehingga tidak hanya memahami ajaran agama secara konseptual, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semakin baik kebijakan kurikulum yang mengintegrasikan literasi keagamaan dalam pembelajaran PAI, semakin tinggi pula tingkat literasi keagamaan

¹² Nafi, Jamilatun, et al. "Karakteristik Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah." *Auladuna: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 1–2.

¹³ Ziliwu, Yusman. "Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dan Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Literasi Keagamaan Anak Prasekolah." *AUD Cendekia: Journal of Islamic Early Childhood Education*, vol. 05, no. 02, 2025, pp. 77–92.

¹⁴ *Ibid.*

peserta didik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di madrasah.

4. **Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan**

Implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan perubahan karakteristik peserta didik. Perubahan pola belajar menjadi tantangan utama karena peserta didik lebih terbiasa memperoleh informasi melalui media digital yang bersifat visual, audio, dan interaktif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional¹⁵. Selain itu, kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi keagamaan di internet juga berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman apabila peserta didik tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang benar. Oleh karena itu, kurikulum PAI tidak hanya dituntut menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁶.

Kebijakan Kurikulum Merdeka memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama melalui pemberian ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh proses pembelajaran. Kurikulum ini tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi semata, tetapi menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, serta pembentukan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁷ Dalam implementasinya, guru diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran PAI menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami ajaran Islam secara konseptual, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata, seperti sikap religius, toleransi, tanggung jawab, dan akhlak mulia.¹⁸

5. **Rekomendasi Strategis bagi Penguatan Kebijakan Kurikulum PAI**

Rekomendasi strategis bagi penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) menekankan pentingnya rekonstruksi kurikulum yang bersifat inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Kurikulum PAI perlu dikembangkan melalui penerapan prinsip diferensiasi pembelajaran, integrasi teknologi, serta pendekatan multikultural dan humanistik agar proses pembelajaran mampu mengakomodasi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik difabel.

¹⁵ Wahyuni, Sri, et al. "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif Untuk Penguatan Layanan Pembelajaran Ramah Difabel." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 3, 2026, pp. 2032–42.

¹⁶ Manshur, Ahmad, and Farida Isroani. "Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 4, 2023, pp. 351–68.

¹⁷ Izzah, Nurul. "Politik Kurikulum PAI: Analisis Kekuasaan Foucault Dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam 2000-2025 Nurul Izzah." *An-Nur: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, vol. 1, no. 2, 2025, pp. 98–112.

¹⁸ Mayasari, Annisa. "Analisis Pengembangan Kurikulum Dan Materi PAI Melalui Program Literasi Keagamaan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 2, May 2023, pp. 209–30.

Selain itu, penguatan kurikulum harus didukung oleh peningkatan kompetensi guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang akomodatif, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah difabel, serta penerapan sistem evaluasi yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan dan perkembangan individu peserta didik. Keberhasilan implementasi kurikulum juga memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, guru pendamping khusus, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Dengan demikian, penguatan kurikulum PAI diharapkan mampu menghasilkan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas, adil, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami, sikap toleran, serta penghargaan terhadap keberagaman, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya

KESIMPULAN

Periodisasi kebijakan kurikulum PAI pascareformasi menunjukkan pergeseran orientasi yang dinamis, sejalan dengan perubahan konteks politik, sosial, dan ideologi negara. Pada awal era Reformasi, kebijakan diarahkan pada desentralisasi pendidikan melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang memberi ruang lebih luas bagi guru dan satuan pendidikan untuk mengembangkan materi keislaman sesuai karakteristik daerah. Memasuki era Kurikulum 2013, orientasi bergeser ke pembentukan karakter melalui integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan penekanan pada nilai toleransi, nasionalisme, dan akhlak mulia. Selanjutnya, pada periode pasca-2020 hingga terbitnya Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, PAI direkonstruksi menjadi instrumen penguatan moderasi beragama sebagai respons atas isu radikalisme, meski di sisi lain memunculkan kecenderungan homogenisasi pemahaman keagamaan karena negara turut menentukan bentuk pengetahuan agama yang dianggap sah melalui regulasi kurikulum.

Kurikulum Merdeka membawa karakteristik pembelajaran PAI yang berpusat pada peserta didik, ditandai oleh tiga ciri utama: pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pendalaman materi esensial berbasis kompetensi (akidah, ibadah, akhlak, Al-Qur'an Hadis, dan sejarah kebudayaan Islam), serta fleksibilitas metode pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Karakteristik ini memberi keleluasaan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang kontekstual sekaligus mendorong peserta didik belajar secara lebih aktif, kreatif, dan bermakna, sejalan dengan pendekatan konstruktivisme.

Terdapat korelasi yang erat antara kebijakan kurikulum dengan literasi keagamaan peserta didik. Kebijakan kurikulum yang mengintegrasikan program literasi keagamaan terbukti mampu memperluas wawasan keislaman, membiasakan kegiatan membaca dan mengkaji literatur keagamaan, serta melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menyaring sumber informasi keagamaan. Semakin baik integrasi tersebut ke dalam desain tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran PAI, semakin tinggi pula kualitas literasi keagamaan dan mutu pembelajaran PAI, khususnya di lingkungan madrasah.

Implementasi kurikulum PAI di era digital menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama perubahan pola belajar peserta didik yang lebih akrab dengan informasi berbasis digital, visual, dan interaktif, serta risiko kesalahpahaman keagamaan akibat kemudahan akses informasi di internet tanpa disertai kemampuan literasi digital dan berpikir kritis yang memadai. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka memberi implikasi positif berupa ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam keseluruhan proses pembelajaran, sehingga PAI tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi semata, melainkan pada pembentukan karakter religius, sikap toleran, tanggung jawab, dan akhlak mulia yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik.

Dengan demikian, transformasi kurikulum PAI SMA pascareformasi mencerminkan bentuk *state anxiety* yang utilitarian, yakni kecemasan negara dalam menjaga stabilitas ideologis dan sosial melalui instrumen pendidikan agama. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dirancang secara top-down, keberhasilan implementasinya pada akhirnya sangat bergantung pada kapasitas kritis, kreativitas, dan komitmen para pendidik di tingkat lokal dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang bermakna.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan pengembangan kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam PAI yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kebijakan kurikulum hendaknya tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan literasi keagamaan, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan digital.

Kedua, guru PAI perlu meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, dan literasi digital agar mampu mengimplementasikan kurikulum secara optimal. Guru diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat berlangsung lebih kreatif, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik.

Ketiga, satuan pendidikan perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pelaksanaan kurikulum PAI secara maksimal, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai maupun melalui budaya sekolah yang religius, inklusif, dan humanis. Sekolah juga perlu mendorong kegiatan literasi keagamaan secara berkelanjutan agar peserta didik memiliki kesempatan untuk membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mendukung keberhasilan pembelajaran PAI. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik di luar lingkungan kelas. Dukungan tersebut akan membantu peserta didik menginternalisasikan nilai-nilai agama secara lebih utuh, sehingga tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

- Abduh, Muhamad, and Mohd Azmi Omar. "Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 5, no. 1, Mar. 2012, pp. 35–47, <https://doi.org/10.1108/17538391211216811>.
- Achmad, Fatoni. "Implikasi Kurikulum Merdeka Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan, Dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 52–63.
- Ahmadi, Ahmadi, and Minnah El Widdah. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, vol. 4, no. 1, Jan. 2023, pp. 104–13, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1376>.
- Ali, M. Makhrus, et al. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian." *Educational Journal*, vol. 2, no. 2, 2022, <https://id.scribd.com/document/787019467/Ali-et-al-makhrus-2022>.
- Alim, Ansurul, and Dwi Ratnasari. "Evolusi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Umum: Tinjauan Historiografis Berbasis Literatur Kebijakan." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, vol. 3, no. 2, Jun. 2026, pp. 47–61, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v3i2.2190>.
- Izzah, Nurul. "Politik Kurikulum PAI: Analisis Kekuasaan Foucault Dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan Islam 2000-2025 Nurul Izzah." *An-Nur: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, vol. 1, no. 2, 2025, pp. 98–112, <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>.
- Magdalena, et al. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. IAIN Padangsidempuan Press, 2021, [https://repo.uinsyahada.ac.id/945/6/Metode Penelitian.pdf](https://repo.uinsyahada.ac.id/945/6/Metode%20Penelitian.pdf).
- Manshur, Ahmad, and Farida Isroani. "Tantangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 4, 2023, pp. 351–68.
- Mayasari, Annisa. "Analisis Pengembangan Kurikulum Dan Materi PAI Melalui Program Literasi Keagamaan Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah." *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 2, May 2023, pp. 209–30, <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i2-4>.
- Nafi, Jamilatun, et al. "Karakteristik Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah." *Auladuna: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, 2023, pp. 1–2, <https://doi.org/10.62097/au.v6i01>.
- Neliwati, et al. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, vol. 4, no. 2, Aug. 2023, <https://doi.org/10.30596/jppp.v4i2.15475>.

Purwanza, Wahyu Sena, et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi.*

CV Media Sains Indonesia, 2020,
https://www.researchgate.net/publication/363094958_Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_Kombinasi.

Putri, Helmalia, et al. "The Implementation of the Independent Curriculum at State Senior High School 10 Palembang." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 1, Jun. 2024, pp. 166–71, <https://doi.org/10.19109/elidare.v10i1.21652>.

Radjendra, Ryan, et al. "Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Pai Di Sekolah Dan Madrasah: Telaah Pustaka Terhadap Paradigma Dan Praktiknya Di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 10, no. 4, 2025, pp. 212–25.

Sina, Ibu. *Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains*. 1st ed., Widina Media Utama, 2024, https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567675-metodologi-penelitian-kualitatif-dan-kua-37bbbe00.pdf?exp=1783258262&kid=1&sig=fwh1YtNaREPA0nc_CSwmVLPN4pc1deHwXSYAQPZDKU.

Wahyuni, Sri, et al. "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pendidikan Inklusif Untuk Penguatan Layanan Pembelajaran Ramah Difabel." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 4, no. 3, 2026, pp. 2032–42, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5556>.

Ziliwu, Yusman. "Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dan Pendidikan Agama Islam Untuk Meningkatkan Literasi Keagamaan Anak Prasekolah." *AUD Cendekia: Journal of Islamic Early Childhood Education*, vol. 05, no. 02, 2025, pp. 77–92.